



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 5 Januari 2024/Periodik - 2023)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU
UNIT KERJA : INSPEKTORAT DAERAH

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **BUNG TOMO**
2. Jabatan : **INSPEKTUR**
3. NHK : **154357**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. **1.425.000.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 600 m²/200 m² di KAB / KOTA KAPUAS HULU, HASIL SENDIRI Rp. 600.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 255 m²/114 m² di KAB / KOTA KUBU RAYA, HASIL SENDIRI Rp. 625.000.000
3. Tanah Seluas 50000 m² di KAB / KOTA KAPUAS HULU, WARISAN Rp. 200.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. **384.000.000**

1. MOTOR, HONDA GL PRO SEPEDA MOTOR Tahun 1988, HASIL SENDIRI Rp. 3.000.000
2. MOTOR, HONDA HONDA K1HO2N14LO Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 6.000.000
3. MOBIL, MAZDA SPORT 2 Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp. 100.000.000
4. MOBIL, TOYOTA KIJANG INNOVA Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 275.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. **862.550.000**

D. SURAT BERHARGA Rp. **----**

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. **46.987.561**

F. HARTA LAINNYA Rp. **----**

Sub Total Rp. **2.718.537.561**

III. HUTANG Rp. **----**

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. **2.718.537.561**



1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.